

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan bernegara tidak jarang terjadi sebuah konflik. Terdapat berbagai macam konflik, salah satunya yaitu konflik etnis. Konflik yang terjadi bisa antar kelompok etnis di dalam negara (konflik horizontal) maupun konflik antara etnis yang ada di dalam negara dengan pemerintahan negara (konflik vertikal).¹ Pada konflik yang terjadi antara Bangsa Moro dengan pemerintah Filipina di latar belakang anggapan Bangsa Moro bahwa adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah Filipina baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Hal itu dikarenakan perbedaan identitas antara Bangsa Moro yang merupakan muslim dan mayoritas penduduk Filipina yang beragama Katolik. Bangsa Moro mendiami kepulauan Sulu-Mindanao dan gugusan pulau lainnya di Filipina Selatan.²

Pada tahun 1968, terbentuk gerakan Mindanao Independent Movement (MIM) yang bertujuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Moro. Pada tahun 1971, terbentuk Moro National Liberation Front (MNLF) yang menganggap konflik di Filipina Selatan membuat kaum muslim menjadi korban dari kebijakan pemerintah Filipina. Selanjutnya pada tahun 1984, terbentuk Moro Islamic Liberation Front (MILF) sebagai hasil dari perpecahan MNLF dimana pendiri MILF menentang adanya

¹ Thung Ju Lan, "Teori dan Praktek dalam Studi Konflik di Indonesia," LIPI, Antropologi 1 (2010) : 28.

² International Crisis Group. "Laporan Latar Belakang Tentang Filipina Selatan : Terorisme dan Proses Perdamaian," Singapore/Brussels, ICG Asia Report N80 (Juli 2004) : 4-6.

negosiasi damai yang dilakukan pemimpin MNLF dengan pemerintah Filipina karena tidak sejalan dengan tujuan utama berdirinya MNLF yaitu untuk membentuk negara merdeka dari Filipina.³ Dampak dari konflik yang terjadi antara kelompok pemberontak dengan pemerintah Filipina ini yaitu lebih dari 120 ribu orang tewas dan 2 juta lainnya mengungsi.⁴

Dalam operasi perdamaian penyelesaian konflik bersenjata biasanya menggunakan strategi militer. Intervensi militer dilakukan dengan menurunkan pasukan militer ke daerah konflik, seperti yang dilakukan oleh pasukan perdamaian bersenjata PBB.⁵ Intervensi militer secara empiris dalam berbagai kasus sebenarnya memperburuk kekerasan dalam jangka pendek dan hanya dapat mengurangi kekerasan dalam jangka panjang jika intervensi tidak memihak atau netral. Penelitian lain menunjukkan penggunaan strategi militer justru meningkatkan durasi perang, membuat konflik lebih lama dan berdarah serta konsekuensi regional yang lebih serius.⁶ Menurut Rachel Julian, ahli dari Universitas Leeds-Beckett, pasukan perdamaian bersenjata memiliki keterbatasan karena perdamaian yang dicari oleh mereka tidak didasarkan pada pengetahuan, praktek, dan tradisi orang-orang yang terlibat langsung didalam konflik. Pemeliharaan perdamaian bersenjata memaksakan perdamaian secara

³ Riswanto, Drs. Ridwan Melay, M.Hum dan Drs. Tugiman, M.S. "Konflik Muslim Moro dengan Pemerintah Filipina Tahun 1968 – 1996 (Suatu kajian Historis)," Universitas Riau : 8-10.

⁴ M.Faisal, "Syariat Islam di Mindanao Akankah Berakhir Seperti di Aceh," [tirto.id](https://tirto.id/syariat-islam-di-mindanao-akankah-berakhir-seperti-aceh-cQhC) (2018).
<https://tirto.id/syariat-islam-di-mindanao-akankah-berakhir-seperti-aceh-cQhC> (diakses pada 3 September, 2018).

⁵ Rolf C. Carriere, "The World Needs 'Another Peacekeeping,'" Institut fur Friedensarbeit und Gewaltfreie Konfliktaustragung, Sozio-Publishing 509 (2010) : 1.

⁶ Stephen Zunes, "Military Intervention In Syria Is a Bad Idea," (Juni 2012).
https://www.huffingtonpost.com/stephen-zunes/military-intervention-in-syria_b_1392673.html (diakses pada 3 September 2018)

eksternal, memperkenalkan resolusi sementara dari luar. Hal ini sering dilaksanakan sesuai dengan model yang tetap dan ditentukan yang diterapkan dengan keseragaman relatif di berbagai daerah dan di semua jenis konflik.⁷

Sebagai upaya alternatif atas intervensi militer yang dianggap memiliki banyak dampak buruk, terdapat upaya non-militer yang dilakukan oleh INGO yang berfokus pada upaya perdamaian yaitu Nonviolent Peaceforce (NP). Sebuah INGO yang memiliki kantor pusat di Ferney Voltaire, Perancis yang terbentuk pada tahun 2002.⁸ NP melindungi masyarakat sipil di dalam konflik kekerasan melalui strategi tanpa senjata dengan prinsip kerja utama yaitu non-kekerasan, tidak keberpihakan, dan tanpa campur tangan. Dalam membangun perdamaian, NP berdampingan dengan komunitas lokal.⁹ Dengan menerapkan program perlindungan tanpa senjata, NP berusaha untuk menghentikan siklus kekerasan yang menyebar melalui setiap aspek kehidupan komunitas yang terpengaruh oleh konflik.¹⁰

NP merupakan satu-satunya INGO yang beraktivitas dan tinggal dekat penduduk yang paling terkena dampak konflik sejak tahun 2007.¹¹ Mereka mendapat undangan dari organisasi lokal yang bekerja untuk perdamaian yang tergabung dalam tim Bantay Ceasefire. Organisasi lokal tersebut mampu mencapai beberapa

⁷ Annie Hewitt, "Why Unarmed Civilian Protection is The Best Path To Sustainable Peace," *Waging Nonviolence* (Juli 2018).

<https://wagingnonviolence.org/feature/unarmed-civilian-protection-sustainable-peace/>, (diakses pada 18 September, 2018).

⁸ Nonviolent Peaceforce, *Background-Mission-History*, Nonviolent Peaceforce.

<https://www.nonviolentpeaceforce.org/background/mission-history> (diakses pada 3 September, 2018)

⁹ Nonviolent Peaceforce, *Nonviolent Peaceforce Strategy 2015-2020*, Nonviolent Peaceforce (2015) : 1.

¹⁰ Luxembourg Peaceprize.org, *Nonviolent Peaceforce*.

¹¹ Dr. Cordula Reimann, *Nonviolent Peaceforce - Evaluation of NP's Project in Mindanao, Philiphine* (Sonnenbergstrasse, Swiss : Swiss Peace, 2009), 12.

keberhasilan awal dalam misi pemantauan gencatan senjata, tetapi mereka memiliki pengetahuan dan kapasitas yang terbatas ketika menyangkut usaha preventif. Pemantau lokal kristen dan muslim juga terkadang mengalami kesulitan jika berkegiatan lintas komunitas dan dapat menghadapi persepsi bias.¹²

Pada tahun 2009, NP diundang pemerintah Filipina dan MILF menjadi satu-satunya INGO yang bergabung dengan International Monitoring Team (IMT). IMT merupakan sebuah tim yang dibentuk yang dimandatkan untuk melakukan pengawasan penerapan *Tripoli Agreement* antara pemerintah Filipina dengan MILF.¹³ Didalam IMT, NP ditempatkan sebagai *Civilian Protection Component* (CPC) bersama dengan tiga NGO lokal untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian gencatan senjata pemerintah Filipina dan MILF, yang dimandatkan untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat, termasuk semua non-kombatan.¹⁴

Tujuan aktivitas NP di Filipina diantaranya pertama, meningkatkan kerja dari tim perdamaian lokal melalui kehadirannya dan melaporkannya ke dunia luar. Kedua, berkontribusi pada pemeliharaan gencatan senjata dan bekerja untuk mencegah kekerasan baru. Ketiga, membantu dan menghubungkan kelompok-kelompok

¹² Canan Gunduz dan Raul Torralba, *Evaluation of the Nonviolent Peaceforce Project with the Civilian Protection Component of the International Monitoring Team in Mindanao, Philippines* (Mediateur-European forum for international medication and dialogue, 2014), 19.

¹³ Lam Peng Er, *Japan's Peace-Building Diplomacy in Asia-seeking a more active political role*, (Routledge, 2009), 80

¹⁴ Nonviolent Peaceforce, "International Civilian Protection Monitor, Nonviolent Peaceforce (Philippines)," (2018), <https://globalnotes.hhh.umn.edu/2018/05/international-civilian-protection.html> (diakses pada 7 Oktober, 2018).

advokasi lokal dan internasional. Keempat, memastikan akar konflik diselesaikan melalui dialog di tingkat lokal dan tidak tumbuh menjadi krisis yang lebih besar.¹⁵

Berdasarkan evaluasi dari Swiss Peace pada 2010, terdapat berbagai pencapaian NP seperti keberhasilan dalam menjangkau dan bekerjasama dengan beberapa aktor kunci dari pihak pemerintah, pasukan bersenjata Filipina, MILF, dan lainnya. Kehadiran NP di Filipina telah menjadi yang pertama dan paling efektif dalam menstabilkan situasi keamanan. Organisasi lokal dan masyarakat berpendapat bahwa karena kehadiran NP tingkat situasi keamanan membaik. Selanjutnya, berdasarkan evaluasi program pada tahun 2011, pencapaian NP seperti ketersediaan perlindungan sipil dalam bentuk respon cepat, pendampingan dan kehadiran fisik.¹⁶ Berdasarkan evaluasi oleh Mediateur pada tahun 2014, pencapaian NP sebagai anggota CPC diantaranya menjaga gencatan senjata dan tidak adanya insiden pelanggaran sejak awal 2012, menjadikan salah satu faktor penting dalam menjaga momentum politik di belakang proses perdamaian hingga terjadinya penandatanganan *Comprehensive Agreement on Bangsamoro (CAB)* antara Pemerintah Filipina dengan MILF untuk mengakhiri konflik.¹⁷

Dengan sejarah panjang konflik yang terjadi antara Bangsa Moro dengan Pemerintah Filipina, dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan upaya yang dilakukan NP sebagai strategi operasi perdamaian non-militer dalam membantu proses perdamaian konflik dari dalam masyarakat yang terkena dampak konflik.

¹⁵ Nonviolent Peaceforce, *Background-Mission-History*.

¹⁶ Jose-Maria Taberne, *Evaluation of Nonviolent Peaceforce Program in the Philippines (Nonviolent Peaceforce, 2011)*, 30.

¹⁷ Gunduz dan Torralba, *Evaluation of the Nonviolent Peaceforce Projects*, 47.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam upaya operasi perdamaian penyelesaian konflik pada umumnya menggunakan strategi militer. Namun pada perkembangannya banyak efek negatif yang ditimbulkan sehingga muncullah pendekatan non-militer yang dilakukan oleh warga sipil melalui sebuah INGO. Salah satunya yaitu Nonviolent Peaceforce (NP). NP merupakan satu-satunya INGO yang beraktivitas dan tinggal di wilayah konflik yang mulai menjalankan aktivitasnya pada tahun 2007. Dalam perkembangannya NP menjalankan berbagai aktivitas seperti pada tahun 2009 NP diundang menjadi anggota CPC dari IMT. Berbagai pencapaian berhasil dilakukan oleh NP semenjak awal kehadirannya pada 2007 seperti dapat menjangkau aktor utama pada konflik, menstabilkan situasi keamanan yang membuat warga sipil merasa aman dalam beraktivitas, memainkan peran penting sehingga terciptanya ruang negosiasi diantara pihak-pihak menjelang penandatanganan *Comprehensive Agreement* pada tahun 2014, dan berhasil menciptakan kepatuhan terhadap gencatan senjata sejak 2012-2014. Berdasarkan serangkaian pencapaian yang dilakukan NP sebagai sebuah INGO yang melakukan aktivitas tanpa senjata pada konflik bersenjata tersebut, maka menarik untuk dianalisis tindakan NP dalam membantu proses perdamaian pada konflik di Filipina Selatan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, penulis memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut yaitu bagaimana upaya Nonviolent Peaceforce dalam membantu proses perdamaian konflik antara Bangsa Moro dengan pemerintah Filipina?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya yang dilakukan oleh Nonviolent Peaceforce dalam membantu proses perdamaian konflik antara Bangsa Moro di Filipina Selatan sebagai strategi operasi perdamaian non-militer.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Sebagai bahan kajian Ilmu Hubungan Internasional khususnya kajian Resolusi Konflik sekaligus dapat memperkaya topik kajian Ilmu Hubungan Internasional di bidang Resolusi Konflik.
2. Memberikan gambaran tentang upaya organisasi internasional menggunakan strategi operasi perdamaian non-militer dalam membantu proses perdamaian konflik bersenjata.
3. Menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional dalam bidang kajian Resolusi Konflik karena dapat dilihat bahwa strategi operasi perdamaian non-militer merupakan salah satu solusi yang efektif dalam membantu proses perdamaian konflik bersenjata.



1.6. Tinjauan Pustaka

Dalam menganalisis mengenai judul yang diangkat peneliti melakukan tinjauan pada beberapa kajian pustaka yang dianggap relevan pada penelitian kali ini.

Kajian pustaka pertama yang penulis gunakan adalah “*The World Needs Another Peacekeeping*” yang ditulis oleh Rolf C. Carriere. Pada tulisan ini Rolf menjelaskan bahwa kita membutuhkan bentuk baru dari kegiatan *Peacekeeping*. Pandangan umum melihat bahwa disetiap ada konflik bersenjata maka diperlukan

pasukan perdamaian bersenjata. Dia melihat bahwa pasukan bersenjata sulit dalam membangun relasi dengan komunitas lokal untuk mengambil hati dan pemikiran mereka. Diperlukan upaya oleh masyarakat sipil tanpa bersenjata untuk mendekati diri dengan masyarakat yang terdampak konflik bersenjata. Biaya yang mahal juga membuat penurunan pasukan perdamaian bersenjata menjadi hal yang harus dihindarkan. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai keefektifan dari ada tim perdamaian tanpa senjata disituasi konflik.¹⁸ Tulisan ini berkontribusi untuk memberikan pandangan bahwa lebih baik diturunkan tim perdamaian tanpa senjata pada suatu konflik yang menjadi landasan berfikir pada penelitian ini. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian ini yaitu tulisan ini hanya berfokus pada upaya perubahan pendekatan pasukan perdamaian pada suatu konflik sedangkan penelitian ini berupaya menjelaskan upaya NP sebagai pasukan perdamaian tanpa senjata pada konflik di Filipina Selatan.

Kajian pustaka kedua adalah tulisan dari Riswanto, Ridwan Melay dan Tugiman dengan judul "*Konflik Muslim Moro dengan Pemerintah Filipina Tahun 1968-1996*". Jurnal ini menjelaskan tentang sejarah awal mula terjadinya konflik di Filipina Selatan antara Bangsa Moro dengan Pemerintah Filipina dalam menuntun kesenjangan politik, sosial, budaya dan ekonomi. Kesenjangan ini menjadi alasan Bangsa Moro menuntut kemerdekaan melalui pergerakan yang dilakukan oleh berbagai kelompok pemberontak.¹⁹ Tulisan ini berkontribusi untuk memberikan gambaran jelas

¹⁸Rolf C. Carriere, "The World Needs 'Another Peacekeeping'," Institut für Friedensarbeit und Gewaltfreie Konfliktaustragung, Sozio-Publishing 509 (2010).

¹⁹Riswanto, Drs. Ridwan Melay, M.Hum dan Drs. Tugiman, M.S. "Konflik Muslim Moro dengan Pemerintah Filipina Tahun 1968 – 1996 (Suatu kajian Historis)," Universitas Riau.

terkait latar belakang lahirnya konflik dan alasan munculnya pergerakan pemberontak sebagai sebuah bentuk upaya memerdekakan diri dari pemerintah Filipina. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tulisan ini lebih berfokus pada segi historis konflik di Filipina Selatan sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada upaya NP dalam membantu proses perdamaian di Filipina Selatan.

Kajian pustaka ketiga berjudul “*The Origin and Development of Unarmed Civilian Peacekeeping*” yang ditulis oleh Rachel Julian dan Christine Schweitzer. Pada tulisan ini dipaparkan informasi secara umum terkait *Unarmed Civilian Peacekeeping / Unarmed Civilian Protection (UCP)* dan alasan pentingnya penerapan UCP dalam proses perdamaian penyelesaian konflik. Selain itu, juga dijelaskan bagaimana UCP bekerja dan bagaimana penerapan yang dilakukan UCP dikawasan konflik dapat dikatakan efektif. Lebih jauh, tulisan ini menjelaskan bagaimana perkembangan UCP dalam tatanan kebijakan dan praktiknya secara jelas. Christine Schweitzer merujuk model perkembangan UCP dalam tiga generasi, yaitu: pertama, model *protective accompaniment*, merujuk pada pendampingan terhadap aktivis HAM ataupun tokoh perdamaian lokal dari kekerasan yang bermotif politis dimotori oleh Peace Brigades International (PBI) yang beroperasi di Guatemala, El Salvador, Indonesia, Nepal dan Kolombia pada periode 1980-an. Kedua, UCP yang dimandatkan oleh organisasi supranasional seperti Uni Eropa (UE) di Yugoslavia dan Georgia, Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) di Kosovo, dan Peace Monitoring Group oleh pemerintah Australia dan Selandia Baru di Papua Nugini. Bentuk kegiatan dari periode kedua ini yaitu penyaluran asistensi humaniter serta mempertahankan situasi damai pasca gencatan senjata. Ketiga, operasi perdamaian oleh personel sipil dan tidak

bersenjata yang dijalankan oleh NGO-NGO internasional, khususnya Nonviolent Peaceforce. Pada intinya ketiga model perkembangan tersebut memiliki persamaan bahwa UCP merupakan strategi tanpa kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil tanpa menggunakan senjata.²⁰ Tulisan ini peneliti operasionalkan sebagai landasan berfikir mengenai UCP didalam praktik dan perkembangan kebijakannya ketika membantu proses perdamaian konflik di suatu wilayah sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis upaya NP di Filipina Selatan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tulisan ini lebih menjelaskan mengenai konsep UCP itu sendiri sedangkan penelitian ini berusaha menjelaskan upaya NP menggunakan konsep UCP.

Kajian pustaka keempat yang penulis gunakan yaitu “Perbandingan Aktivitas Nonviolent Peaceforce dan Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam Operasi Perdamaian Internasional di Sudan Selatan” yang ditulis oleh Alfiandi Rahman. Tulisan ini menjelaskan mengenai penerapan pendekatan *Unarmed Civilian Protection* oleh Nonviolent Peaceforce dalam membantu proses perdamaian di Sudan Selatan. Dalam penjabarannya Alfiandi membandingkan upaya dalam membantu proses perdamaian yang dilakukan oleh NP dan PBB. PBB dalam upayanya tetap menurunkan pasukan bersenjata dan tidak beraktivitas secara tetap di wilayah konflik melainkan hanya di markasnya saja. Sementara NP menurunkan tim perdamaian tanpa senjata dengan beraktivitas di wilayah konflik. Selain itu, dalam menciptakan *safe space* PBB membentuk batas-batas wilayah tertentu, sedangkan NP tidak menciptakan batasan nyata melainkan *safe space* tercipta dari persepsi yang dibentuk melalui hubungan dan

²⁰ R. Julian dan C. Schweitzer, “*The Origin and Development of Unarmed Civilian Peacekeeping*, *Peace Review*,” *Journal of Social Justice*, vol. 27, no. 3, (2015) : 2-3.

kepercayaan.²¹ Tulisan ini berkontribusi terhadap penelitian ini dimana adanya penjelasan mengenai penerapan strategi yang dilakukan NP pada konflik di Sudan Selatan tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tulisan ini menjelaskan upaya NP pada konflik di Sudan Selatan sedangkan penelitian ini upaya NP pada konflik di Filipina Selatan.

Kajian Pustaka kelima merupakan tulisan dari Jamail. A Kamlian yang berjudul “*Ethnic and Religious Conflict in Southern Philippines : A Discourse on Self-Determination, Political Autonomy, and Conflict Resolution*”. Tulisan ini menggambarkan mengenai latar belakang historis dan demografis gerakan pemisahan diri yang dilancarkan Bangsa Moro. Selain itu dalam penjabarannya juga dijelaskan mengenai berbagai inisiatif negosiasi yang dalam upaya resolusi konflik yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat, seperti *Tripoli Agreement pada 1976*, yang berisi perjanjian gencatan senjata juga pembentukan pemerintahan otonomi di Filipina Selatan antara MNLF dengan pemerintah Filipina yang mencakup 13 provinsi, yaitu Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Cotabato utara, Manguindanao, Sultan Kudarat, Lanao Norte, Lanao Sur, Davao Sur, Cotabato selatan, dan Palawan. Selanjutnya inisiatif pembentukan *The Autonomous Region of Muslim Mindanao* (ARMM) oleh konstitusi Filipina, yang mencakup lima provinsi yaitu Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao dan Lanao Del Sur, serta kota Marawi. Namun inisiatif tersebut dianggap melanggar kesepakatan pada perjanjian Tripoli dimana seharusnya dibentuk tiga belas provinsi. Meskipun dianggap berdampak positif

²¹ Alfiandi Rahman, “Perbandingan Aktivitas *Nonviolent Peaceforce* dan Perserikatan Bangsa – bangsa Dalam Operasi Perdamaian Internasional Di Sudan Selatan,” Yogyakarta (2017).

dalam menuju perdamaian dengan MNLF atas pembentukan ARMM, namun konflik terus berlanjut dengan kelompok MILF. *The GRP-MILF Peace Agreement* pada 1996, berisi tentang, tahap pertama, periode transisi pada tiga tahun pertama, dan diikuti oleh Pemerintahan Otonomi Regional Baru yang akan dilaksanakan mulai dari September 1999. Rencana akhir otonomi wilayah yang diselenggarakan pada 14 Agustus 2001. Selain itu juga pemilu untuk memilih gubernur, wakil gubernur dan perwakilan regional ARMM, dan juga pembentukan *Bishop-Ulama Forum*.²² Tulisan ini akan berkontribusi pada penelitian ini dikarenakan adanya penjelasan mengenai upaya-upaya perjanjian yang telah dilakukan dalam penyelesaian konflik di Filipina Selatan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tulisan ini menjelaskan tentang upaya perdamaian melalui perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan, sedangkan penelitian ini lebih kepada upaya membantu proses perdamaian dari dalam agar proses perjanjian tersebut berjalan efektif.

Dari beberapa tulisan yang dijadikan tinjauan pustaka diatas, terdapat perbedaan yang telah dijelaskan dengan penelitian ini. Meskipun demikian, kelima tulisan tersebut tidak langsung menjawab pertanyaan yang diangkat pada penelitian ini. Oleh sebab itu, pada penelitian ini peneliti lebih berfokus kepada upaya-upaya yang dilakukan oleh NP dengan pendekatan UCP dalam membantu proses perdamaian di Filipina Selatan.

²² Jamail A. Kamlan, "*Ethnic Ethnic and Religious Conflict in Southern Philippines : A Discourse on Self-Determination, Political Autonomy, and Conflict Resolution,*" *Global & Strategies* no.1 (2011).

1.7.Kerangka Konseptual

Penulis akan menggunakan sebuah kerangka konseptual sebagai kerangka berfikir untuk menjawab rumusan permasalahan dan pertanyaan yang diajukan, yaitu:

1.7.1. *Unarmed Civilian Protection*

Perdamaian merupakan sebuah proses memunculkan damai tanpa melakukan kekerasan baik langsung maupun tidak langsung. Proses memunculkan damai merujuk pada tindakan kreatif individu agar dapat mentransformasi konflik dengan cara memahami konflik, bagaimana konflik diatasi dan diubah dengan kreatif tanpa menggunakan kekerasan.²³ Dalam prosesnya mengurangi atau meniadakan kekerasan, maka terdapat praktik operasi perdamaian tanpa kekerasan dan tanpa senjata yang dikenal dengan UCP.

Menurut Huibert Oldenhuis, melalui *manual book* yang diterbitkan oleh United Nations for Training and Research (UNITAR) dan bekerjasama dengan NP, *Unarmed Civilian Protection* (UCP) adalah Praktik mengerahkan warga sipil tanpa senjata baik sebelum, selama, dan setelah masa konflik kekerasan, untuk mencegah atau mengurangi kekerasan, memberikan perlindungan fisik langsung, dan memperkuat atau membangun infrastruktur perdamaian lokal.²⁴ Praktik UCP bersifat tanpa kekerasan dan nonpartisan. Perlindungan diberikan atas undangan dari aktor lokal dan melibatkan setiap pihak yang terkait dengan konflik. Tindakan ini mendukung aktor lokal ketika mereka bekerja untuk mengatasi akar dan konsekuensi dari konflik

²³ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means : Peace and Conflict, Development, and Civilization*, (London dan New Delhi : Sage Publication, 1996), 9.

²⁴ Huibert Oldenhuis, " *Unarmed Civilian Protection – strengthening civilian capacities to protect civilians against violence*,"UNITAR : 30.

kekerasan. Praktik ini didasarkan pada hukum internasional, dalam prinsip kekebalan sipil dalam perang, dan dalam perlindungan yang diberikan oleh konvensi internasional.²⁵

Istilah UCP menggambarkan satu kesatuan aktivitas seperti pendampingan, pengendalian isu, dialog antar kelompok masyarakat, membangun *safe space* dan melakukan *monitoring*. Istilah UCP pertama kali digunakan oleh Lisa Schirch pada tahun 1995 didalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Swedish Life and Peace Institute.²⁶ Menciptakan *safe space* di tengah wilayah konflik merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh aktor UCP. *Safe space* merupakan sebuah konsepsi abstrak mengenai bagaimana rasa aman dihadirkan dalam sebuah komunitas sosial. *Safe space* harus dibentuk melalui metode tanpa kekerasan agar siapapun yang masuk kedalamnya tidak hanya merasa aman, namun yang lebih penting menghilangkan niatan untuk melakukan kekerasan.²⁷ Prinsip nonpartisan atau ketidakberpihakkan kemudian menjadi sesuatu yang harus diutamakan agar kepercayaan dari komunitas sipil lokal dapat terbentuk dan hubungan dapat dibina dengan semua aktor di lokasi operasi perdamaian.

Kehadiran aktor UCP kemudian merefleksikan perubahan paradigma dalam tingkatan teoritis studi operasi perdamaian, menantang asumsi fundamental bahwa dalam menghadapi kekerasan maka dibutuhkan tentara bersenjata untuk mencegah dan

²⁵UNITAR, *Unarmed Civilian Protection*, UNITAR.

<http://onlinelearning.unitar.org/unarmed-civilian-protection/> (diakses pada 18 Oktober, 2018)

²⁶R. Julian dan C. Schweitzer, "The Origin and Development of Unarmed Civilian Peacekeeping, *Peace Review*," *Journal of Social Justice*, vol. 27, no. 3, (2015) : 1.

²⁷Rahman,"Perbandingan Aktivitas *Nonviolent Peaceforce*", 7.

mengurangnya.²⁸ Terdapat empat metode utama UCP yang digunakan disesuaikan pada situasi konflik tertentu dan masing-masing memiliki berbagai bentuk diantaranya :²⁹

a. *Proactive Engagement* (Keterlibatan Proaktif).

Keterlibatan proaktif menegaskan bahwa ketika kehadiran praktisi UCP dapat membantu dalam memberikan perlindungan, keamanan nyata biasanya datang melalui keterlibatan proaktif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk mereka yang menargetkan warga sipil. Terdapat tiga bentuk dari *proactive engagement* yaitu *Protective presence*, *Protective accompaniment*, dan *Interpositioning*.

Bentuk pertama, *Protective Presence* (Kehadiran Pelindung), merupakan metode spesifik yang digunakan oleh personel UCP untuk keterlibatan proaktif, yang ditempatkan secara strategis di lokasi dimana warga sipil menghadapi ancaman yang akan segera terjadi.

Bentuk yang kedua, *Protective Accompaniment* (Pendampingan Pelindung), merupakan kehadiran pelindung dalam gerakan. Pendampingan pelindung diberikan kepada warga sipil karena mereka merasakan ancaman baik selama perjalanan mereka dari satu tempat ke tempat lain, atau saat tiba di tempat tujuan.

Bentuk yang ketiga, *Interpositioning* (Interposisi), adalah tindakan fisik menempatkan diri di antara pihak-pihak yang bertikai untuk mencegah mereka menggunakan kekerasan terhadap satu sama lain. Interposisi bekerja dengan cara yang

²⁸ R. Julian, "A Determination to Protect: The State of the Art," *Background and Discussion Paper of Unarmed Civilian Peacekeeping Symposium*, no. 47, *Bund für Soziale Verteidigung (Federation for Social Defence)*, Bonn, (2015) : 13.

²⁹ Huibert Oldenhuis, "Unarmed Civilian Protection – strengthening civilian capacities to protect civilians against violence," UNITAR : 118-162.

mirip dengan kehadiran pelindung dan pendampingan, meskipun sering membutuhkan memobilisasi lebih banyak anggota praktisi UCP hanya untuk satu aktivitas. Penerapan ini juga membutuhkan keterlibatan yang lebih menonjol dan pengambilan risiko yang lebih besar oleh praktisi UCP daripada metode UCP lainnya. Dalam menggunakan interposisi sangat penting untuk memiliki hubungan yang kuat, berkelanjutan dan teruji dengan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, penting untuk mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan utama dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang konteks dan konflik.

b. Monitoring (Pemantauan).

Pemantauan pada dasarnya adalah praktik mengamati kepatuhan terhadap standar. Tujuan pemantauan adalah membantu semua pihak yang terlibat untuk membuat keputusan yang tepat dan tepat waktu yang akan meningkatkan kualitas pekerjaan, memastikan akuntabilitas, dan mendorong pelaksanaan sesuai rencana. Terdapat tiga bentuk dari pemantauan diantaranya : *Ceasefire monitoring*, *Rumour control*, dan *Early warning early respose (EWER)*.

Bentuk yang pertama, *Ceasefire Monitoring* (Pemantauan Gencatan Senjata), digunakan untuk mengamati kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata oleh pihak gencatan senjata, memverifikasi dugaan pelanggaran gencatan senjata, dan meningkatkan kesadaran di antara masyarakat (dan terkadang pihak-pihak dalam gencatan senjata).

Bentuk kedua, *Rumour Control* (Kontrol Rumor), mengacu pada verifikasi rumor yang berpotensi berkontribusi pada peningkatan kekerasan, konflik atau ketidakamanan. Hal ini termasuk: pemantauan dan pengidentifikasian desas-desus,

memverifikasi rumor bila memungkinkan, dan memfasilitasi penyebaran informasi faktual dengan berbagai pihak, bila memungkinkan dan tepat, untuk mencegah kekerasan, eskalasi konflik dan atau pemindahan dini.

Bentuk ketiga, *Early Warning / Early Response* (EWER : Peringatan dini / Tanggapan Awal), adalah tindakan pemantauan yang sistematis untuk mencegah kekerasan, mengurangi dampak kekerasan, dan meningkatkan keselamatan dan keamanan warga sipil dalam situasi konflik kekerasan. Dengan memantau perkembangan konflik, dimungkinkan untuk memprediksi perkembangan krisis. Pembentukan mekanisme EWER dimulai dengan identifikasi area krisis. Setelah identifikasi area krisis tertentu, maka dikumpulkan informasi dasar dan dilakukan identifikasi indikator potensi konflik. Setelah itu dilakukan analisis data dan merumuskan skenario yang masuk akal dalam membuat rencana aksi untuk setiap skenario.

c. *Relationship Building* (Pembangunan Hubungan)

Hubungan merupakan aspek penting dari semua metode UCP, memiliki hubungan yang kredibel dengan aktor-aktor kunci dan pemangku kepentingan lainnya membantu membuka saluran komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih. Terdapat dua bentuk dari Pembangunan hubungan yaitu *Confidence building*, dan *Multi-track dialogue*.

Bentuk yang pertama, *Confidence Building* (Pembangunan Keyakinan), adalah persoalan mendukung keyakinan daripada mengubah kondisi eksternal atau meningkatkan keterampilan. Keyakinan merupakan penerapan pembangunan hubungan karena meningkatnya keyakinan cenderung membuat orang menjadi

terbuka. Hal ini mengarah ke lebih banyak keterlibatan, inisiatif, kreativitas, dan konfrontasi. Keyakinan dapat dibangun dengan berbagai cara seperti mendorong kepemilikan lokal dari kegiatan bersama dan meningkatkan partisipasi, mendorong diskusi dimana orang-orang setempat mengenali keahlian mereka sendiri, menceritakan studi kasus yang menunjukkan bagaimana orang-orang seperti mereka telah memainkan peran penting dalam perlindungan, menawarkan bantuan pengembangan keterampilan untuk keamanan dan perlindungan, hukum internasional, pemantauan dan lainnya.

Bentuk yang kedua dari pembangunan hubungan yaitu *Multi-track Dialogue*. Bentuk ini mencakup dialog di berbagai tingkat dengan berbagai aktor termasuk pemimpin kelompok bersenjata, komandan militer, pejabat pemerintah, perwakilan komunitas masyarakat, dan diplomat. Dialog digunakan untuk membangun jaringan pendukung, mempengaruhi aktor, memahami kebutuhan perlindungan, dan mengurangi konflik.

d. Capacity Development (Pengembangan Kapasitas)

Dalam konteks UCP dipahami sebagai penguatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk tujuan pencegahan kekerasan dan perlindungan sipil. Terdapat dua bentuk dari pengembangan kapasitas yaitu *Training*, dan *Local protection infrastructure*.

Bentuk pertama, *Training* (Pelatihan), adalah kegiatan terorganisir untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Dalam konteks UCP, pelatihan berarti bekerja bersama dengan orang-orang dalam proses penemuan, analisis, dan pengembangan keterampilan yang dinamis. Pelatihan UCP diberikan

sebagai tanggapan langsung terhadap kebutuhan dan kepentingan kelompok sasaran yang teridentifikasi dalam situasi konflik kekerasan tertentu.

Bentuk yang kedua, *Local Protection Infrastructures* (Infrastruktur Perlindungan Lokal), merupakan bagian dari infrastruktur perdamaian lokal. Prasarana perdamaian lokal harus dibuat atau diperkuat, sehingga memungkinkan proses perdamaian produktif yang sedang berlangsung di tingkat lokal di mana gencatan senjata dan perjanjian damai biasanya gagal, yang mengarah kepada kembalinya permusuhan dan tindakan kekerasan. Pengembangan infrastruktur perlindungan lokal biasanya dimulai dengan menganalisis cara orang-orang lokal melindungi diri mereka sendiri ketika para pelaku internasional tidak hadir. Dengan cara-cara ini mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan di mana UCP dilandasi. Komunitas tertentu dalam situasi konflik kekerasan dapat mempertimbangkan perpindahan dan pemberian strategi perlindungan yang paling efektif.

Metode UCP bersifat dinamis, memperkuat dan saling melengkapi satu sama lain. Metode tersebut dimanfaatkan dan disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik dari populasi yang ditargetkan. UCP memiliki keunggulan pragmatis dan ekonomi seperti efisien secara biaya dan dapat dioperasikan relatif cepat. UCP berlaku di semua tahap konflik, dari mencegah eskalasi di awal hingga mempertahankan gencatan senjata dan perjanjian damai selama tahap-tahap selanjutnya.³⁰

³⁰ Nonviolent Peaceforce, "Peacebuilding and Unarmed Civilian Protections," (April 2016), 5.

Dalam penelitian ini penerapan konsep UCP yang dijadikan kerangka kerja oleh NP dengan melihat aktivitas NP berdasarkan pada empat metode yang sudah dijelaskan sebelumnya.

1.8. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.³¹ Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna dari data yang telah didapatkan.³² Dengan menggunakan metode penulisan deskriptif, peneliti mencoba menggambarkan upaya Nonviolent Peaceforce dalam membantu proses perdamaian pada konflik di Filipina Selatan melalui pendekatan *Unarmed Civilian Protection* (UCP). Penggunaan metode penulisan deskriptif ditujukan agar dapat menggambarkan dan menyampaikan masalah yang diteliti secara cermat dan lengkap.

1.8.1. Batasan Penelitian

Dibutuhkan suatu batasan dalam penelitian sehingga penelitian ini bisa tepat sasaran. Batasan pada penelitian ini merujuk pada dua hal yaitu batasan waktu disaat fenomena terjadi yang diperlukan dalam penelitian, dan batasan yang menjadi fokus

³¹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* 4th Edition, (California: SAGE Publications, 2013), 4.

³² John W. Creswell, *Research Design*, 4-5.

permasalahan dalam penelitian ini. Batasan penelitian ini adalah penulis hanya melihat upaya Nonviolent Peaceforce dalam membantu proses perdamaian pada konflik di Filipina Selatan. Sedangkan batasan waktu mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014. Penulis mengambil batasan awal tahun 2007, karena tahun tersebut merupakan awal aktivitas secara resmi NP di Filipina. Selanjutnya, batasan akhir tahun 2014 dikarenakan pada tahun tersebut tidak adanya pelanggaran gencatan senjata antar pihak yang berkonflik dan disepakatinya *Comprehensive Agreement* yang dianggap keberhasilan oleh NP.

1.8.2. Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan unit yang perilakunya akan dianalisis dan terpengaruh oleh berlakunya suatu pengetahuan. Unit analisis juga dikenal dengan variabel dependen.³³ Unit eksplanasi juga dikenal dengan variabel independen. Pada penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah Nonviolent Peaceforce, dengan unit eksplanasi pada penelitian ini adalah konflik di Filipina Selatan. Sedangkan tingkat analisis dalam penelitian ini adalah kelompok.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian akan digunakan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan, dan yang pada

³³ Mohtar Masoed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, (Jakarta: LP3ES, 1990), 35.

akhirnya akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan.³⁴

Penelitian ini berlandaskan pada studi kepustakaan yang termasuk sumber sekunder yaitu suatu dokumen yang ditulis melalui hasil penelitian terkait suatu kejadian oleh orang yang tidak mengalami kejadian tersebut secara langsung. Dokumen-dokumen ini tidak memiliki hubungan langsung dengan kejadian atau orang-orang yang diteliti. Pengumpulan data untuk penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan sumber-sumber informasi berupa data-data yang mendukung dan dianggap relevan. Sumber tersebut didapat baik dari buku-buku, jurnal, artikel *online*, berita, situs dan lainnya yang menyediakan persediaan data yang sesuai untuk penelitian ini.

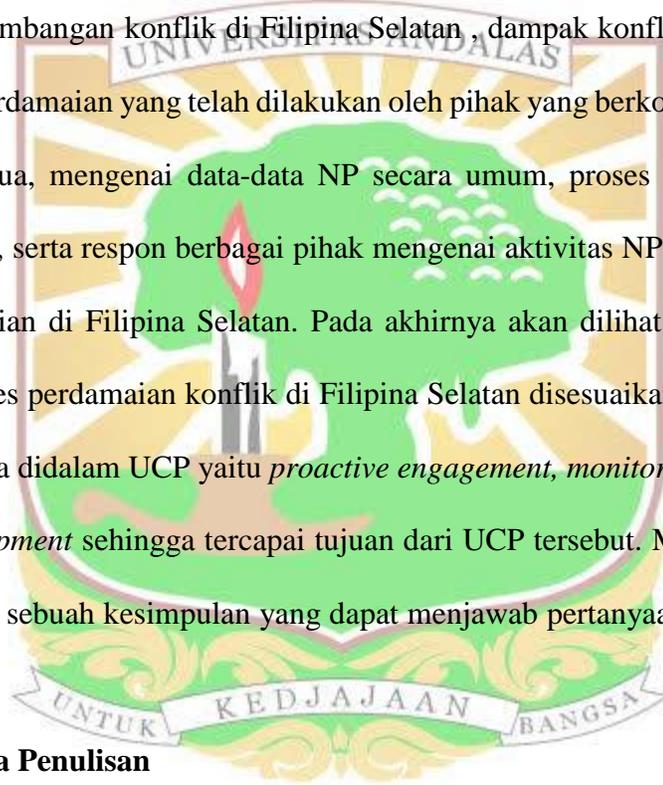
Pada penelitian ini data utama yang menjadi sumber adalah data yang terdapat dalam situs-situs resmi yang menyediakan informasi dengan kata kunci diantaranya Konflik bersenjata, Kelompok pemberontak, Proses perdamaian, *Unarmed Civilian Protection*, Filipina Selatan. Seperti, data mengenai sejarah konflik yang terjadi antara Bangsa Moro dengan Pemerintah Filipina. Data selanjutnya adalah data mengenai upaya proses perdamaian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengatasi konflik di Filipina Selatan. Kemudian data yang dibutuhkan adalah mengenai proses masuk serta aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh NP pada konflik di Filipina Selatan yang dapat diakses melalui situs resmi dari NP maupun berbagai jurnal atau laman yang membahas mengenai NP. Data yang akan dianalisis berupa data dokumen, data publikasi, data

³⁴ Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Depok: PT GRAFINDO PERSADA, 2014), 129.

resmi, berita, laporan serta pernyataan elit politik dan data lainnya yang dianggap perlu. Kemudian, data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal artikel, berita, hasil survei dan sumber lainnya terkait yang mempunyai validitas terkait penelitian ini

1.8.4. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan konsep UCP. Teknik analisis dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data-data mengenai perkembangan konflik di Filipina Selatan, dampak konflik serta mengenai upaya proses perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak yang berkonflik. Selanjutnya pada tahap kedua, mengenai data-data NP secara umum, proses masuknya NP ke Filipina Selatan, serta respon berbagai pihak mengenai aktivitas NP dalam membantu proses perdamaian di Filipina Selatan. Pada akhirnya akan dilihat upaya NP dalam membantu proses perdamaian konflik di Filipina Selatan disesuaikan dengan metode-metode yang ada didalam UCP yaitu *proactive engagement, monitoring, building, dan capacity development* sehingga tercapai tujuan dari UCP tersebut. Melalui proses ini, akhirnya ditarik sebuah kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan.



1.9. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, konsep, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian.

BAB II : Konflik Bangsa Moro dengan Pemerintah Filipina

Bab ini berisi tentang sejarah mengenai konflik yang terjadi antara Bangsa Moro dengan Pemerintah Filipina, dampak yang diakibatkan terjadinya konflik, serta dinamika upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian konflik tersebut.

BAB III : Keterlibatan Nonviolent Peaceforce pada Konflik di Filipina Selatan

Bab ini berisi tentang deskripsi mengenai Nonviolent Peaceforce. Pada bab ini juga akan mendeskripsikan latar belakang, tujuan, program Nonviolent Peaceforce, dinamikanya dalam konflik serta pandangan berbagai pihak terhadap aktivitas Nonviolent Peaceforce.

BAB IV : Analisis Upaya Nonviolent Peaceforce dalam Membantu Proses Perdamaian pada Konflik di Filipina Selatan

Pada bab ini peneliti menggunakan pendekatan UCP untuk memaparkan dan menganalisis upaya Nonviolent Peaceforce dalam membantu proses perdamaian konflik di Filipina Selatan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan hasil dari penelitian.

